

## MENGUKUR KESEJAHTERAAN PETANI BERDASARKAN INDEKS KAPABILITAS MASYARAKAT: STUDI KASUS DI KECAMATAN AMPEK ANGKEK, KABUPATEN AGAM

### *Measuring Farmers Welfare Based on Community Capability Index: A Case Study in Ampek Angkek Subdistrict, Agam Regency*

Marlina Wirmas\*, Retno Widodo Dwi Pramono

Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan,  
Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada  
Jln. Grafika No. 2, Sekip, Yogyakarta, Indonesia 55281

\*Korespondensi penulis. Email: marlina.wirmas@mail.ugm.ac.id

Diterima: 3 Juni 2021

Direvisi: 2 Agustus 2021

Disetujui terbit: 11 Februari 2022

#### ABSTRACT

Economic welfare paradigm has generated productivity-based agricultural policy which lead to widening inequality due to less consideration on developmental aspects. This study aims to measure welfare using a capability approach that treats human freedom as the center of evaluation. Assessment is conducted by measuring the level of availability and functioning of assets to quantify Community Capability Index (CCI) representing the degree of freedom. This research was conducted in Ampek Angkek subdistrict, Agam Regency by sending questionnaires to qualified farmers to rate some indicators consist of 51 listed assets from five groups. The analysis revealed that on average, the available assets have sufficient quality and can provide functionings in farmers livelihood. However, the degree of freedom was still quite low and caused limitation of certain functionings. Several assets related to financial and intellectual human capital were in low quality and thus had negative implications in farming business development functionings. Advantages in natural-environment, public services and infrastructures, and basic human capital are the potentials to be further developed. Programs to increasing access to financial capital and enhancing human capital quality are necessary to improve their functioning and gaining higher freedom that led to a more prosperous life.

**Keywords:** *assets, community capability index, development evaluation, farmers welfare*

#### ABSTRAK

Paradigma kesejahteraan berbasis ekonomi menciptakan kebijakan pertanian yang mengutamakan produktivitas. Namun, pendekatan ini mengakibatkan ketimpangan yang semakin lebar karena kurangnya pertimbangan terhadap aspek-aspek pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kesejahteraan petani menggunakan pendekatan kapabilitas yang memandang kebebasan manusia dalam melakukan dan menjadi sesuatu sebagai aspek utama evaluasi. Penilaian dilakukan dengan menilai tingkat ketersediaan dan kebermanfaatan serangkaian aset sebagai komponen untuk menghitung Indeks Kapabilitas Masyarakat (CCI) sebagai representasi tingkat kebebasan. Penelitian dilakukan di Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat dengan memberikan kuesioner kepada petani berisikan penilaian terhadap 51 jenis aset dari lima kategori. Hasil analisis menunjukkan secara rata-rata, aset yang tersedia memiliki kualitas cukup dan memberikan fungsi dalam kehidupan petani, namun derajat kebebasan masih cukup rendah dan berdampak kepada keterbatasan dalam kebermanfaatan tertentu. Beberapa aset pada modal finansial dan modal manusia intelektual masih berkualitas kurang baik dan berimplikasi kepada hambatan untuk kebermanfaatan dalam hal pengembangan usaha tani yang lebih produktif. Keunggulan pada kualitas lingkungan, layanan dan infrastruktur publik, serta modal manusia dasar menjadi potensi yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Terhadap hasil tersebut, maka program yang bertujuan untuk memperluas dan memudahkan akses terhadap pembiayaan, serta peningkatan kompetensi modal manusia sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

**Kata kunci:** *aset, evaluasi pembangunan, indeks kapabilitas masyarakat, kesejahteraan petani*

#### PENDAHULUAN

Sektor pertanian di Indonesia masih menjadi salah satu lapangan usaha terbesar, sebesar 37,10% penduduk mendapatkan peng-hasilan dari pekerjaan ini (BPS 2018a). Namun peranan yang

besar tersebut ternyata tidak sebanding dengan persentasenya terhadap ekonomi nasional yang hanya berkontribusi sebesar 12,49% terhadap PDB tahun 2018 (BPS 2018b). Ketimpangan tersebut, jika ditelusuri berdasarkan sejarah pembangunan, berawal dari fokus kebijakan pembangunan perdesaan pada era industrialisasi

yang terfokus untuk menurunkan angka kemiskinan (Swastika 2014). Kebijakan pembangunan yang diterapkan dengan memacu sektor manufaktur memang berhasil memacu pertumbuhan ekonomi sebesar 6,90%, meningkatkan lapangan pekerjaan, serta menurunkan angka kemiskinan (Bappenas 2004). Namun, pengaruh tersebut ternyata tidak sebanding dengan laju pengurangan kemiskinan, sehingga ketimpangan pendapatan menjadi semakin lebar (Damayanthi 2008).

Salah satu latar belakang penyebab semakin besarnya ketimpangan tersebut adalah karena kurang komprehensifnya pembangunan sektor pertanian sebagai penyumbang terbesar rumah tangga miskin pada tahun 1980-an (Booth 2000). Target kebijakan pertanian lebih diarahkan untuk menghasilkan produksi yang lebih tinggi, program diturunkan secara sentralisasi dan seragam pada lingkup nasional, dan berhasil mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pada tingkatan tertentu (Daryanto 2012; Suradisastra 2017). Namun kebijakan yang diterapkan tergolong tidak komprehensif karena kurang mengintegrasikan keterkaitan dengan sektor lain serta pertimbangan daya serap tenaga kerja yang cenderung menurun akibat kondisi lahan yang kian mengecil (Jamal 2009). Paradigma pendekatan produksi ini juga kurang menaruh perhatian kepada peningkatan kapasitas petani, yang menyebabkan rendahnya kesempatan mereka untuk bersaing karena tuntutan kerja yang telah bertransisi kepada penguasaan teknologi (Suradisastra 2017). Akibat struktur yang lemah dan kapasitas yang kurang untuk berkompetisi menyebabkan desa yang bertumpu pada sektor pertanian tidak mampu menghela pembangunannya secara mandiri, yang berdampak terhadap keterbatasan akses masyarakatnya terhadap berbagai fasilitas untuk memajukan kesejahteraan.

Dengan demikian, tolak ukur kesejahteraan sebagai hasil dari berbagai kebijakan pembangunan tidak dapat hanya diukur melalui ketercapaian dari sisi ekonomi makro seperti pendapatan, hasil produksi, dan peningkatan lapangan pekerjaan. Penentuan tujuan pembangunan serta mengukur keberhasilannya menggunakan indikator tersebut nyatanya menghasilkan kebijakan yang kurang komprehensif dan mengakibatkan sebagian kelompok masyarakat malah semakin terpuruk. Tolak ukur konvensional ini tidak mampu mengeksplorasi isu-isu ketimpangan akibat terlalu menggeneralisasi pertumbuhan ekonomi sebagai hasil yang baik. Gébert et al. (2017) mengemukakan bahwa pendekatan ini bersifat *value free*, di mana menganggap adanya hubungan linear antara pendapatan dengan kesejahteraan, yang secara nyata tidak bisa disederhanakan demikian.

Pada kenyataannya, terdapat aspek-aspek kesejahteraan yang jauh lebih luas, dan tidak dapat digeneralisasi hanya dengan beberapa indikator.

*People centered-development* muncul sebagai paradigma alternatif yang dinilai lebih tepat dalam merencanakan pembangunan karena menekankan pembangunan manusia, distribusi sumber daya yang adil, serta keberlanjutan lingkungan sebagai perhatian utama (Brown 1985). Keberagaman manusia dari sisi budaya, kemasyarakatan, kebutuhan dan kepentingan, mengimplikasikan pembangunan merupakan proses endogen dalam artian pada praktiknya harus mengidentifikasi, memelihara dan mempertahankan potensi dan sumber daya lokal (Devkota 1970). Kinerja pembangunan akan dinilai berdasarkan kontribusi langsungnya kepada peningkatan kesejahteraan manusia pada aspek sosial dan psikologis, dan juga pada dimensi fisik dan ekonomi (Korten 1984).

Filosofis paradigma tersebut kemudian berkembang ke dalam berbagai pendekatan dan konsep sebagai instrumen untuk operasionalisasi acuan dalam perencanaan pembangunan. Salah satu pendekatan yang menggunakan paradigma tersebut adalah pendekatan kapabilitas yang pertama kali dikemukakan oleh Sen (2000). Kapabilitas merujuk kepada tingkat kebebasan seseorang untuk melakukan dan menjadi (*doings and beings*) sesuatu yang diinginkan, dan dipercaya sebagai saran utama dari pembangunan (Frediani dan Julia 2015; Robeyns dan Byskov 2021). Dengan demikian, karena cakupan pembahasannya terpaku pada aspek kebebasan, maka pendekatan kapabilitas memiliki kelebihan di dalam mengeksplorasi aspek-aspek multidimensi dan lebih kontekstual sesuai dengan karakteristik wilayah yang diidentifikasi.

Penelitian mengenai kesejahteraan petani di Indonesia sebagian besar dilakukan dengan mengukur nilai tukar petani yang menggambarkan kemampuan daya beli petani terhadap konsumsi barang. Namun indikator ini dinilai belum dinamis terhadap perkembangan pembangunan dan kesejahteraan petani yang semakin tumbuh (Rachmat 2013). Kesejahteraan tidak bisa hanya terpaku kepada kemampuan petani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, namun mencakup aspek yang lebih luas seperti kesempatan atau peluang mereka untuk melakukan dan menjadi (*doings and beings*) sesuatu sesuai dengan nilai dan tujuan hidup yang dimiliki. Selain itu, evaluasi kesejahteraan juga identik dilakukan terhadap hasil keberjalanan program tertentu (Sinuraya et al. 2018; Fallo et al. 2018), sehingga penilaiannya terbatas hanya dalam kerangka kerja program.

Penelitian kesejahteraan petani menggunakan pendekatan kapabilitas belum pernah dilakukan sebelumnya, sehingga menjadi penting untuk memperluas penggunaan paradigma tersebut untuk dapat berkontribusi terhadap pemberian masukan yang lebih komprehensif.

Berdasarkan deskripsi mengenai latar belakang tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kapabilitas sebagai gambaran akan kondisi kesejahteraan petani dalam konteks tingkat kebebasannya dalam *doings and beings*. Kapabilitas akan diukur berdasarkan tingkat ketersediaan dan kebermanfaatannya atas sejumlah kelompok aset yang berperan sebagai modal, sumber daya, akses, maupun kesempatan yang akumulasinya akan membentuk tingkat kapabilitas. Identifikasi lanjutan kemudian juga dilakukan untuk melihat aspek-aspek yang masih kurang dan berkaitan langsung dengan isu-isu yang dihadapi petani. Penelitian ini diperlukan guna memberikan informasi faktual mengenai kondisi nyata kehidupan petani pada aspek yang lebih luas, sehingga dapat menjadi masukan dalam perumusan program yang lebih tepat guna pada sektor pertanian.

## METODE PENELITIAN

### Kerangka Pemikiran

Pendekatan kapabilitas didefinisikan oleh Sen (2000) sebagai disiplin ilmu evaluasi dengan fokus kepada pencapaian dan kebebasan seseorang dalam hal kemampuannya untuk melakukan dan menjadi sesuatu (Robeyns 2017). Terdapat dua konsep kunci dalam pendekatan ini. *Pertama, functionings* yaitu berbagai hal yang seseorang lakukan atau menjadi (*doing or being*) (Sen 2000), yang secara teknis hanya dapat terwujud jika seseorang memiliki dua kemampuan, yaitu kepemilikan komoditas/modal/sumber daya/ *input*; serta situasi yang mendukung untuk bisa mengakses kepemilikan tersebut (Pramono 2020). Konsep *kedua* yaitu kapabilitas yang merujuk kepada tingkat kebebasan untuk mencapai kombinasi alternatif *functioning* (Sen 2000), atau dapat diartikan pula sebagai besaran peluang untuk memilih kebermanfaatannya (Pramono et al. 2019). Kedua aspek ini memiliki kelebihan dalam mengeksplorasi aspek-aspek individual, menjelaskan kenapa seseorang memiliki keterbatasan untuk mencapai/menjadi sesuatu, serta dapat menjelaskan isu-isu seperti ketimpangan dan kemiskinan secara lebih spesifik dan tepat.

Instrumen evaluasi pembangunan wilayah dengan pendekatan kapabilitas disusun oleh Pramono (2020) menggunakan studi persepsi

kepada masyarakat dalam menilai pembangunan berdasarkan tingkat kebebasan masyarakat dalam berfungsi. Kerangka ini mengukur tingkat kapabilitas berdasarkan identifikasi kelengkapan aset yang merepresentasikan modal sekaligus peluang yang bermanfaat bagi masyarakat untuk dapat melakukan berbagai macam fungsi. Terdapat dua aspek yang diukur, yaitu penilaian mengenai kualitas ketersediaan/keterjangkauan aset, dan kebermanfaatannya yang dihasilkan dalam mencapai fungsi yang dituju. Pramono (2020) mengklasifikasikan lima kelompok aset yang masing-masing komponennya diukur berdasarkan dua aspek tersebut dalam rangka melakukan kegiatan produksi. Jenis aset yang digunakan untuk menganalisis kapabilitas dapat bersifat kontekstual, yang berarti dapat menyesuaikan dengan kondisi, keadaan ataupun periode (Pramono 2020).

Pada penelitian ini, terdapat lima kelompok aset yang digunakan untuk mengukur kapabilitas, sebagian besarnya disintesis berdasarkan hasil studi identifikasi persepsi terhadap aset-aset yang berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat (Pramono 2016). Hasil studi tersebut menghasilkan 42 jenis aset, yang kemudian dikelompokkan menjadi lima klasifikasi/kelompok aset. Pengelompokan aset didasarkan atas karakteristik wujudnya, yaitu berwujud dan tanwujud; serta karakteristik kepemilikannya, yang terdiri atas milik individu dan publik.

Lima kelompok yang digunakan yaitu aset tanwujud individu (kemampuan dan keahlian individu), aset institusional sosial (relasi hubungan dan karakteristik sosial), aset berwujud individu (aset berwujud fisik), aset berwujud publik (sarana, prasarana, fasilitas publik dan keadaan lingkungan) dan aset institusional ekonomi (fasilitas, layanan dan kemudahan akses dalam kegiatan ekonomi). Kemudian, karena daftar aset dapat bersifat kontekstual dalam arti dapat disesuaikan dengan pembahasan yang sedang diteliti, maka terdapat beberapa aset yang ditambahkan pada kelompok aset tanwujud individu dan aset institusional sosial. Kedua kelompok ini memiliki komponen yang mewakili modal manusia dan modal sosial sebagai sumber daya yang dipercaya dapat membangkitkan tenaga pembangunan wilayah secara endogen (Dakhli dan De Clercq 2004; Bhandari dan Yasunobu 2009; Migheli 2011; Tan 2014).

Kondisi pembangunan perdesaan yang menunjukkan *rural decline* akibat performa pertanian sebagai tumpuan ekonomi utama semakin menurun (Li et al. 2019), membutuhkan dorongan dari kedua modal internal tersebut untuk dapat bangkit secara mandiri. Identifikasi

terhadap tambahan komponen tersebut dimasukkan ke dalam kedua kelompok aset yang diukur agar sesuai kebutuhan masyarakat sehingga lebih komprehensif dan kontekstual dalam mengukur kapabilitas masyarakat. Berikut adalah daftar komponen aset yang digunakan untuk mengukur tingkat kapabilitas masyarakat pada penelitian ini (Tabel 1).

## Pengumpulan Data

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah deduktif kuantitatif berdasarkan tinjauan literatur mengenai pendekatan kapabilitas. Lokasi penelitian dipilih secara *purposive* dengan kriteria kawasan perdesaan dengan sektor paling dominan pada kegiatan pertanian, dan telah dikembangkan menjadi sektor unggulan. Kecamatan

Tabel 1. Komponen aset dalam mengukur kapabilitas masyarakat

No. Aset	Komponen Aset	Kategori
1	Tingkat pendidikan formal petani	Aset Tanwujud Individu/ <i>Individual Intangible Asset (IIA)</i>
2	Kualitas kesehatan dan kekuatan petani	
3	Kemampuan berbicara bahasa asing	
4	Kemampuan teknis pertanian (hulu, produksi, hilir)	
5	Kemampuan manajemen/tata kelola	
6	Kemampuan kewirausahaan/bisnis	
7	Kemampuan inovasi	
8	Jangkauan akses terhadap teknik terbaru	
9	Kemampuan interpretasi informasi baru	
10	Kemauan untuk belajar dan maju	
11	Daya juang/ketangguhan untuk belajar dan maju	
12	Lahan/ruang untuk bermukim	Aset Berwujud Individu/ <i>Individual Tangible Asset (ITA)</i>
13	Lahan/ruang untuk berusaha/bertani	
14	Memiliki alat transportasi	
15	Memiliki alat komunikasi	
16	Memiliki perangkat untuk mengakses informasi	
17	Kecukupan pendapatan untuk kebutuhan sehari-hari	
18	Memiliki tabungan	
19	Kualitas lingkungan (kebersihan, air, udara, taman publik)	Aset Berwujud Publik/ <i>Public Tangible Asset (PTA)</i>
20	Produktivitas/kualitas lahan	
21	Keamanan dari bencana	
22	Kesiapan pemerintah/masyarakat terhadap manajemen bencana	
23	Kualitas sarana pendukung produksi pertanian	
24	Kualitas sarana pendukung industri lokal	
25	Ketersediaan jaringan jalan (jalan/ kendaraan umum)	
26	Ketersediaan fasilitas transportasi umum	
27	Kualitas transportasi publik	
28	Ketersediaan fasilitas pendidikan	
29	Ketersediaan fasilitas kesehatan	
30	Ketersediaan fasilitas pasar/perdagangan	
31	Kemudahan akses air bersih	
32	Ketersediaan internet untuk masyarakat	
33	Keikutsertaan dalam organisasi sosial kemasyarakatan	Aset Institusional Sosial/ <i>Social Institutional Asset (SIA)</i>
34	Keikutsertaan dalam organisasi sektoral pertanian	
35	Keterlibatan dalam forum diskusi usaha pertanian	
36	Pertukaran informasi terbaru mengenai sektor pertanian	
37	Intensitas gotong royong dan kerja sama	
38	Tingkat solidaritas	
39	Tingkat kejujuran dan kepercayaan dalam masyarakat	
40	Kemudahan akses untuk mendapatkan pinjaman/kredit	Aset Institusional Ekonomi <i>Economy Institutional Asset (EIA)</i>
41	Kemudahan mendapatkan pekerjaan	
42	Kesempatan untuk memulai usaha	
43	Peluang menyalurkan aspirasi/berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan	
44	Kemudahan mendapatkan barang konsumsi sehari-hari	
45	Kemudahan mendapatkan bahan baku produksi pertanian	
46	Kemudahan pemasaran produk pertanian	
47	Peluang dalam mendapatkan bantuan/subsidi pemerintah dalam kegiatan pembangunan	
48	Kemudahan pendaftaran jaminan kesehatan	
49	Kemampuan untuk membayar biaya pendidikan	
50	Kemampuan untuk membeli/mendapatkan/menyewa rumah	
51	Kemampuan pembayaran biaya transportasi	

Sumber: Cohen dan Levinthal 1989; Ghani 2013; Putterman 2013; Pramono 2016

Ampek Angkek dipilih karena merupakan salah satu sentra pertanian khususnya komoditas tanaman pangan di Provinsi Sumatera Barat. Pembangunan sektor pertanian telah diinisiasi sejak awal tahun 2000-an, dan penelitian di wilayah ini akan mampu mendeskripsikan keadaan kesejahteraan petani pada kawasan yang sektor pertaniannya telah cukup berkembang.

Pengumpulan data dilakukan secara primer melalui kuesioner dan wawancara. Kuesioner berisikan 51 komponen aset untuk mengukur kapabilitas, yang masing-masingnya diberikan skor secara persepsi atas seberapa tinggi tingkat kualitas ketersediaan/keterjangkauannya, dan kebermanfaatannya dalam kegiatan produksi maupun kehidupan sehari-hari. Rentang skor diberikan antara -2 hingga 2 yang dapat menggambarkan dikotomi dua arah terhadap kapabilitas yang terbentuk, serta untuk menyederhanakan penghitungan dan interpretasi kuesioner (Pramono 2020). Penggunaan arah positif dan negatif dapat memberikan posisi yang lebih jelas sehingga deskripsi atas kontribusinya bisa dipahami secara lebih konkret. Interpretasi atas rentang skor tersebut disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Rentang penilaian aset

Rentang nilai	Kualitas ketersediaan	Tingkat kemanfaatan
-2	Sangat buruk	Sangat menghambat
-1	Buruk	Cukup
0	Cukup	Tidak jelas
1	Baik	Membantu
2	Sangat baik	Sangat membantu

Sumber: Pramono 2020

Responden dipilih secara *purposive* berdasarkan rekomendasi dari Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Ampek Angkek. Representasi petani dipilih dari keseluruhan petani yang terdaftar dalam BPP sejumlah 2.307 orang, dan didapatkan sebanyak 47 orang responden dari ketujuh nagari. Pemilihan dilakukan berdasarkan kemampuan petani dalam memberikan penilaian secara objektif. Wawancara dilakukan kepada para penyuluh pertanian, dan juga perwakilan petani yang dipilih melalui rekomendasi penyuluh. Waktu pengumpulan data dilakukan pada bulan Februari hingga April 2021.

### Analisis Data

Penilaian Indeks Kapabilitas Masyarakat (*Community Capability Index/CCI*) dihitung berdasarkan kerangka yang disusun oleh

Pramono (2016). Hasil penilaian berdasarkan persepsi nilai keterjangkauan dan kebermanfaatan terhadap 51 jenis aset dirata-ratakan untuk seluruh responden, dan kemudian penghitungan CCI dilakukan menggunakan rumus berikut.

$$CCI = \frac{1}{8} AF^2$$

Keterangan:

- A = rerata skor keterjangkauan seluruh aset
- F = rerata skor kebermanfaatan seluruh aset
- CCI = indeks kapabilitas masyarakat

Rentang hasil penghitungan CCI berkisar antara -1 s.d 1, yang diinterpretasikan bersamaan dengan nilai rerata A dan F. Indeks kapabilitas menunjukkan serangkaian fungsi yang tersedia bagi masyarakat untuk dimiliki, sehingga, dapat dikatakan bahwa ketika nilai CCI telah mendekati 1 dan nilai A dan F mendekati 2, maka masyarakat memiliki tingkat kesempatan yang lebih tinggi untuk mencapai kondisi hidup yang diinginkan, serta tingkat kesejahteraan yang semakin tinggi pula. Interpretasi terhadap indeks yang dihasilkan dapat dilihat pada Tabel 3.

Hasil penilaian terhadap rerata A, F, dan CCI juga ditampilkan dalam kuadran indeks kapabilitas masyarakat yang dapat menggambarkan kondisi perkembangan masyarakat pertanian secara umum. Grafik tersebut dapat memperlihatkan vektor arah energi kapabilitas, apakah telah bernilai positif, yang menandakan kemajuan atau perkembangan yang baik, atau sebaliknya. Posisi kuadran tersebut juga dapat menampilkan posisi dan arah nilai ketersediaan dan kebermanfaatan aset, sehingga dapat diinterpretasikan secara lebih lengkap. Ilustrasi kuadran CCI dapat dilihat pada Gambar 1.

Selanjutnya, interpretasi hasil pengukuran untuk masing-masing kategori aset kemudian dianalisis secara deskriptif berdasarkan informasi tambahan yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan juga data sekunder. Hasil dari identifikasi tersebut kemudian digunakan untuk mengelompokkan kategori dan komponen aset apa saja yang masih kurang memadai, sekaligus yang telah memiliki kualitas dan kebermanfaatan cukup baik. Tabulasi yang dihasilkan akan dikaitkan juga dengan gambaran umum karakteristik petani dari aspek sosial maupun ekonomi serta tinjauan teoritis terhadap kontribusinya dalam kebermanfaatan petani. Dengan demikian, hasil analisis dapat menjelaskan secara lebih komprehensif mengenai hubungan yang terbentuk antara aset, kebermanfaatan yang menjadi potensi sekaligus hambatannya, serta kaitannya dengan tingkat kapabilitas petani.

Tabel 3. Interpretasi pengelompokan hasil CCI

A	F	CCI	Interpretasi
-2	-2	-1	Keadaan paling buruk karena aset sangat menghambat dan akan terus memburuk
-2	2	-1	Kondisi dianggap sangat buruk karena adanya peralihan negatif, dari kondisi paling baik menjadi paling buruk
-1	-2	-0,5	Energi kapabilitas mendorong tren negatif
-1	2	-0,5	
-2	-1	-0,25	
-2	1	-0,25	
-1	-1	-0,125	
-1	1	-0,125	
0	-2	0	Stagnan atau mandek, hidup berjalan tetap. Kondisi sebenarnya bergantung kepada nilai F. Jika positif, berarti mandek dalam kondisi yang bagus, jika negatif berarti mandek dalam kondisi buruk
0	-1	0	
0	1	0	
0	2	0	
1	2	0	
1	-1	0,125	Energi kapabilitas mendorong tren positif
1	1	0,125	
2	-1	0,25	
2	1	0,25	
1	-2	0,5	
1	2	0,5	
2	2	1	
2	-2	1	Kondisi ini dianggap yang terbaik karena adanya perubahan positif, dari yang terburuk menjadi lebih baik
2	2	1	Kondisi terbaik dan tertinggi karena aset sangat membantu, tersedia dan terjangkau

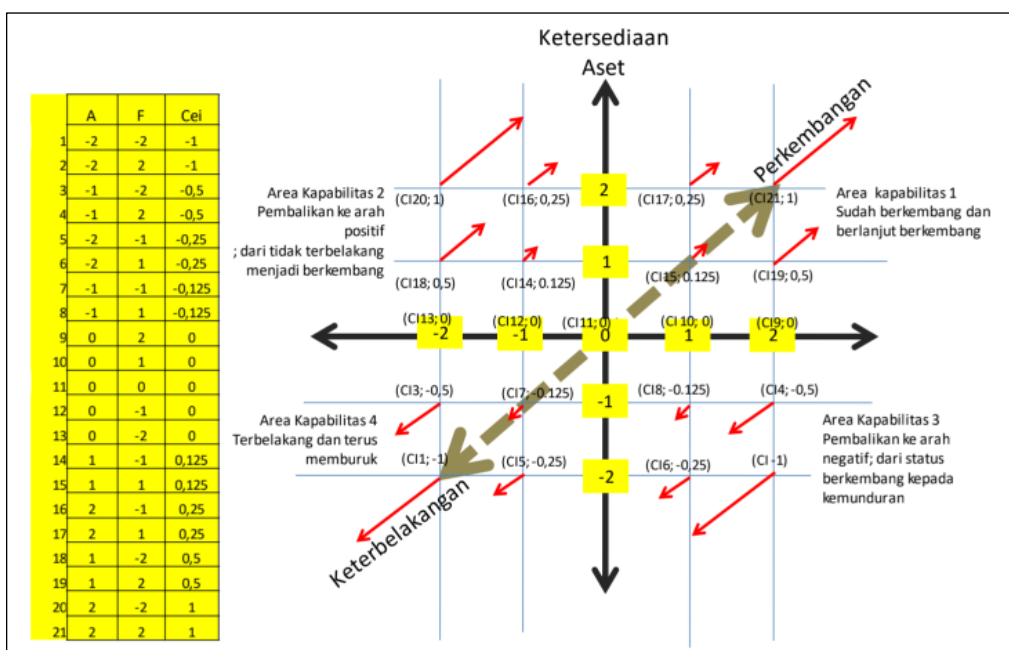
Sumber: Pramono 2020, p. 137–138

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Gambaran Umum Wilayah dan Karakteristik Petani Responden

Kecamatan Ampek Angkek terdiri atas tujuh nagari (setingkat desa) dan terletak di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Wilayah ini menjadi salah satu sentra utama produksi pertanian karena didukung oleh kondisi geografis yang cenderung landai, terletak di kaki Gunung Marapi dengan kondisi tanah cukup subur, serta dukungan iklim dan cuaca yang sejuk (BPP Kecamatan Ampek Angkek 2019). Sebagian besar hasil pertanian dijual untuk menyuplai kebutuhan pangan primer, kegiatan industri pengolahan, serta perdagangan dan jasa di kawasan Kota Bukittinggi dan wilayah Agam Timur.

Secara historis, Kecamatan Ampek Angkek telah ditetapkan sebagai wilayah rintisan pengembangan kawasan agropolitan melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 312/TU.210/A/X/2002 (Kasmadiharja et al. 2016). Pemerintah pusat dan daerah kemudian memulai pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendukung seperti jalan, irigasi, jembatan, pasar dan laboratorium, serta bantuan bibit dan modal budi daya kepada petani (Depkimpraswil 2003; Yunelimeta 2008; Bappeda Sumbar 2018). Kemudian melalui Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam tahun 2010–2030, kecamatan ini ditetapkan sebagai kawasan strategis agropolitan dengan komoditas pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Hingga saat ini, mayoritas



Sumber: Pramono (2020)

Gambar 1. Kuadran indeks kapabilitas masyarakat

kebijakan dan program pembangunan pertanian dijalankan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Agam, dengan tujuan utama untuk peningkatan produksi, daya saing produk dan pengembangan sarana prasarana pertanian (Disperta Agam 2018). Beberapa kegiatan yang dilakukan di antaranya adalah pemberian sarana produksi tani seperti benih dan mesin traktor, perbaikan dan pembangunan infrastruktur seperti irigasi dan parit, serta sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan pertanian (BPP Kecamatan Ampek Angkek 2019).

Berdasarkan wawancara dengan para penyuluh BPP Kecamatan Ampek Angkek, diketahui bahwa sebagian besar komoditas yang ditanami petani lokal adalah padi. Komoditas kedua terbesar adalah ubi, diikuti oleh tanaman sayuran.

Sistem kepemilikan lahan petani dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok, yaitu petani pemilik lahan, petani dengan lahan sewa, dan buruh tani/pekerja lepas (seperti tercantum pada Tabel 3). Petani yang memiliki lahan umumnya adalah penduduk lokal asli, kepemilikan lahan diperoleh secara turun temurun. Adapun petani dengan lahan sewa dan buruh tani umumnya merupakan penduduk pendatang dari luar kecamatan (namun masih wilayah Kabupaten Agam dan sekitarnya) yang datang dan bermukim untuk bekerja.

Karakteristik petani yang dikumpulkan dari kuesioner digolongkan berdasarkan pendidikan, status pekerjaan, penghasilan per bulan, lama bekerja, serta pendapatan, pertumbuhan pendapatan, dan kondisi ketimpangan pendapatan. Berikut adalah tabulasi karakteristik petani di Kecamatan Ampek Angkek yang tersaji pada Tabel 4.

Berdasarkan pengelompokan karakteristik nonekonomi, dapat dilihat bahwa status kerja dan lama bekerja petani di Kecamatan Ampek Angkek secara umum merata pada masing-masing kategori. Adapun dari sisi pendidikan, sebagian besar petani telah menamatkan jenjang SMA. Dari aspek ekonomi, dapat diketahui bahwa kondisi perekonomian petani dari sisi penghasilan dan ketimpangannya berada dalam keadaan yang belum baik atau belum optimal. Sebagian besar petani masih memiliki pendapatan di bawah standar Upah Minimum Regional (UMR) Sumatera Barat sebesar Rp2,48 juta (tahun 2020–2021). Hal ini berarti terdapat beberapa kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi secara maksimal. Pertumbuhan pendapatan yang juga menurun yang dirasakan oleh lebih dari setengah jumlah petani mengindikasikan tidak ada perubahan dalam kualitas kehidupan petani. Kondisi serupa juga didukung oleh penelitian lain mengenai kesejahteraan petani dari sisi pendapatan di berbagai daerah di Indonesia yang menunjukkan

Tabel 4. Karakteristik petani responden

Karakteristik	Kategori	Jumlah responden (orang)	Persentase (%)
Pendidikan terakhir	SD	7	14,89
	SMP	11	23,40
	SMA	21	44,68
	PT/ Diploma	8	17,02
Status pekerjaan	Pemilik lahan dan pengusaha tani	16	34,04
	Petani lahan sewa	13	27,66
	Buruh tani lepas (harian)	18	38,30
Lama bekerja	0 s.d. 5 tahun	14	29,79
	5 s.d. 15 tahun	20	42,55
	Di atas 15 tahun	13	27,66
Rerata penghasilan	< 1 juta/ bulan	24	51,06
	1 s.d. 2,4 juta/ bulan	18	38,30
	2,4 s.d. 5 juta/ bulan	5	10,64
Kondisi pendapatan 2-3 tahun ini	Menurun	29	61,70
	Tetap	8	17,02
	Meningkat	10	21,28
Persepsi ketimpangan pendapatan	Jauh di bawah rata-rata	9	19,15
	Di bawah rata-rata	16	34,04
	Sama dengan rata-rata	22	46,81

Sumber: Analisis Penulis (2021)

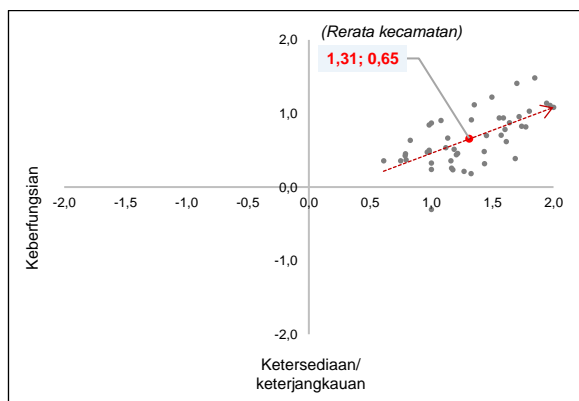
tingkat kesejahteraan yang rendah (Martina dan Praza 2018; Mustika 2019; Rahayu et al. 2021). Dalam memandang keadaan ekonomi petani dengan masyarakat sekitarnya, lebih dari setengah dari jumlah petani juga merasakan bahwa keadaannya berada di bawah rata-rata penduduk nagari. Sebagian wilayah Kecamatan Ampek Angkek termasuk ke dalam kawasan perkotaan Bukittinggi, dan jenis pekerjaan penduduknya sudah lebih beragam, khususnya pada sektor sekunder dan tersier. Hal ini menyebabkan adanya persepsi petani bahwa pekerjaan yang digeluti kurang memberikan penghidupan yang layak dibandingkan dengan warga sekitar. Persepsi ini juga didukung dengan kondisi pendapatan petani yang memang masih belum sesuai dengan standar UMR.

**Tingkat Kesejahteraan Petani Berdasarkan Perspektif Kapabilitas**

Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus indeks kapabilitas masyarakat, hasil analisis menunjukkan indeks kapabilitas petani adalah 0,14, rerata keterjangkauan aset (A) adalah 0,65, dan rerata kebermanfaatan aset (F) adalah 1,31. Indeks kapabilitas tersebut menunjukkan angka yang tidak terlalu tinggi (rentang indeks -1 s.d. 1, namun telah memiliki arah yang positif. Hasil ini menandakan serangkaian aset yang ada telah mampu menciptakan peluang terhadap kebermanfaatan petani, meskipun kesempatan yang tersedia belum terlalu maksimal. Jika ditempatkan pada kuadran CCI seperti yang tersaji pada Gambar 2, posisi A, F dan CCI pada kuadran satu (K1) menunjukkan tren perkembangan kapabilitas petani yang semakin baik. Rerata kualitas ketersediaan aset pada rentang antara cukup menuju baik. Meskipun nilai A tidak begitu baik, petani memberikan penilaian yang cukup tinggi terhadap kebermanfaatan yang dirasakan, sehingga nilai kapabilitas yang terbentuk telah memiliki arah dan kecenderungan yang semakin berkembang.

Kesejahteraan dalam paradigma pendekatan kapabilitas berarti kebebasan untuk melakukan aktivitas dan mencapai keadaan yang bernilai, dan secara kontekstual merupakan tingkat kesempatan untuk meraih capaian tersebut (Alkire 2016). Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kapabilitas yang dimiliki oleh petani sudah memiliki tren yang baik, aset-aset yang ada telah mampu mengakumulasi penciptaan peluang dan kesempatan terhadap perwujudan kebebasan petani dalam kehidupannya. Namun, derajat kebebasan yang masih belum tinggi berimplikasi kepada terbatasnya kebermanfaatan yang dapat dimiliki oleh petani. Untuk dapat memahami komponen apa saja yang memerlukan

peningkatan agar dapat memaksimalkan kapabilitas petani, diperlukan penjabaran lebih lanjut terhadap kelima kategori aset yang diukur pada bagian berikut.



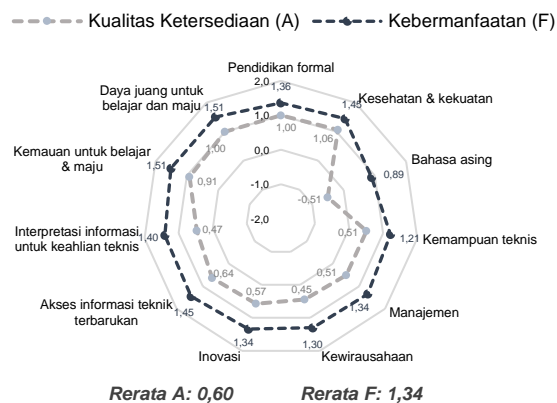
Sumber: Analisis penulis (2021)

Gambar 2. Grafik kuadran indeks kapabilitas masyarakat petani Kecamatan Ampek Angkek

**Kondisi Aset Petani**

**Aset Tanwujud Individu**

Aset tanwujud individu merepresentasikan kemampuan atau keahlian yang melekat pada masing-masing individu, dan umumnya berpengaruh secara langsung terhadap produktivitas kinerja pekerjaan. Pada aspek ketersediaan aset, penilaian dilakukan dengan persepsi individu mengenai kualitas kemampuan yang dimiliki, sedangkan pada aspek kebermanfaatan, penilaian dikhususkan kepada tingkat manfaat yang diberikan pada kegiatan pertanian. Hasil penilaian atas kedua aspek tersebut untuk masing-masing komponen aset tersaji pada Gambar 3 berikut.



Sumber: Analisis penulis (2021)

Gambar 3. Grafik pengukuran aset tanwujud individu



Rerata hasil yang didapatkan pada aspek keterjangkauan (A) petani adalah sebesar 0,60, artinya di antara cukup dan baik. Aset tanwujud dengan kualitas baik (dengan rerata skor 1) berdasarkan persepsi petani adalah pendidikan formal, kesehatan dan kekuatan, serta kemauan dan daya juang untuk belajar dan maju. Dari hasil ini diketahui bahwa petani memiliki modal kekuatan yang baik untuk melakukan usaha tani, serta motivasi untuk terus maju. Pada aspek kemampuan yang dibutuhkan untuk dapat berkontribusi kepada kemajuan dan daya saing sektor pertanian, yaitu kemampuan teknis, manajemen, kewirausahaan, inovasi, serta akses dan informasi teknik terhadap teknik terbaru, analisis menunjukkan angka berkisar antara 0,45 – 0,64, yang berarti masih belum mencapai kategori baik untuk dapat menciptakan daya saing. Selain itu, terdapat satu komponen dengan penilaian keterjangkauan negatif, yaitu bahasa asing dengan interpretasi agak buruk.

Pada aspek kebermanfaatan, petani secara umum menjawab secara rata (kecuali untuk komponen kemampuan bahasa asing) pada angka 1,30 – 1,51, yang menggambarkan aset memberikan manfaat terhadap kelancaran proses usaha tani. Adapun aset yang memberikan manfaat tertinggi adalah kesehatan dan kekuatan, informasi terbaru, serta kemauan dan daya juang. Hal ini memperlihatkan bahwa petani selain mengandalkan kekuatan fisik dan berusaha tani, petani telah menyadari akan manfaat terhadap akses informasi serta motivasi untuk maju.

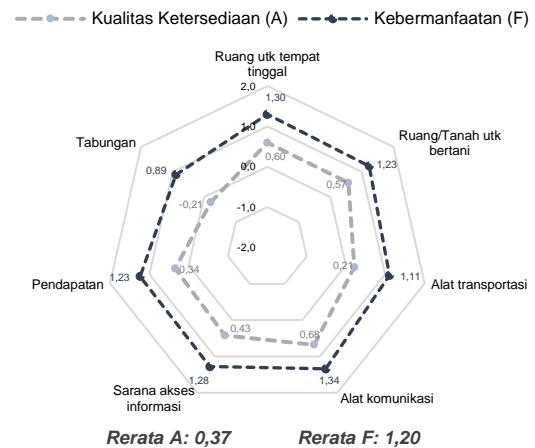
### Aset Berwujud Individu

Aset berwujud individu menggambarkan aset-aset yang memiliki wujud fisik dan biasanya diasosiasikan sebagai modal untuk kegiatan produksi. Kepemilikan aset ini juga banyak digunakan sebagai ukuran tingkat kekayaan seseorang secara konvensional.

Berdasarkan hasil analisis yang tersaji pada Gambar 4, dapat dilihat bahwa ketersediaan aset berwujud petani secara rata-rata berada pada kondisi sedikit di atas cukup dengan nilai yang lebih rendah dari aset tanwujud individu. Terdapat komponen dengan nilai negatif, yaitu tabungan, yang merepresentasikan keadaan yang buruk/kurang. Ketidakstabilan pendapatan yang diterima oleh petani menjadi penyebab utama belum mampunya mereka untuk memiliki tabungan. Selain itu masih banyaknya petani dengan status pekerja harian dengan periode kerja yang tidak tetap juga menjadi latar belakang rendahnya angka untuk komponen ini.

Pada aspek kebermanfaatan, rerata untuk jenis aset ini juga menunjukkan nilai yang lebih rendah

dibandingkan dengan aset tanwujud. Representasi angka 1,20 pada Gambar 4 menunjukkan adanya kebermanfaatan yang dirasakan oleh petani dengan adanya kepemilikan aset tersebut. Komponen kepemilikan alat komunikasi mendapat nilai tertinggi, yang menandakan bahwa para petani telah merasakan adanya manfaat terhadap pertukaran informasi dari proses komunikasi. Dari sisi pekerjaan, manfaat utamanya didapatkan dari adanya grup sosial media antarpetani yang dapat memberikan banyak informasi terbaru.



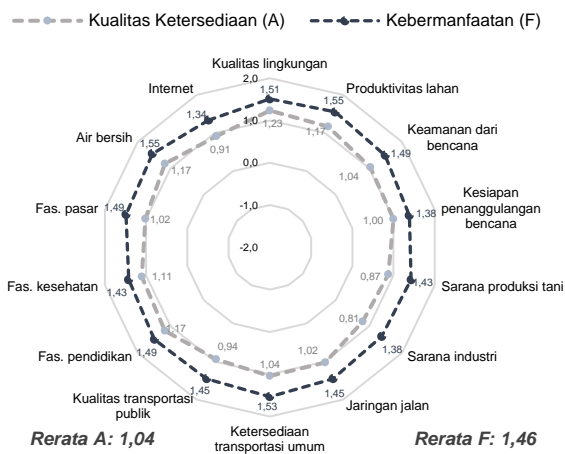
Sumber: Analisispenulis (2021)

Gambar 4. Grafik pengukuran aset berwujud individu

### Aset Berwujud Publik

Aset berwujud publik merepresentasikan berbagai fasilitas dan layanan publik yang dapat diakses masyarakat secara luas, dan merupakan kelompok dengan jumlah komponen paling banyak. Kelompok aset ini secara umum mendukung terselenggaranya kegiatan sehari-hari petani, baik dari aktivitas ekonomi maupun nonekonomi. Hasil penilaian terhadap kelompok aset ini tersaji pada Gambar 5.

Pada aspek ketersediaan dan kebermanfaatan, kelompok aset ini mendapatkan nilai rerata tertinggi di antara kelima aset lain, aset memiliki kualitas baik dan tidak terdapat satu pun aset yang bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kondisi fasilitas publik di Kecamatan Ampek Angkek berada pada kualitas baik dan memberikan manfaat bagi para petani lokal. Beberapa komponen utama dan pendukung untuk kegiatan pertanian seperti produktivitas lahan, kualitas jaringan jalan, ketersediaan transportasi umum, fasilitas pasar dan air bersih dinilai oleh petani memiliki kualitas keterjangkauan yang baik dan memberikan kebermanfaatan paling tinggi bagi kegiatan petani.



Sumber: Analisis Penulis (2021)

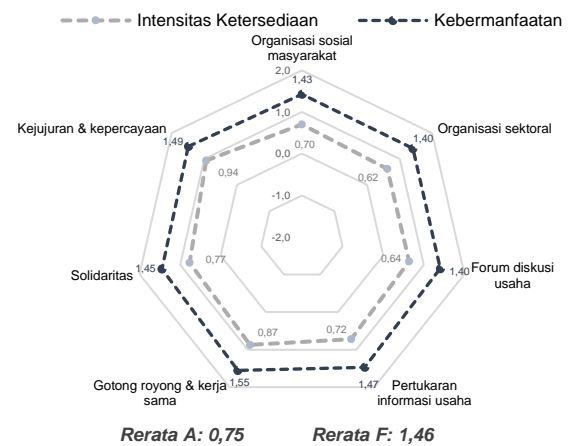
Gambar 5. Grafik pengukuran aset berwujud publik

Empat aset dengan nilai keterjangkauan lebih rendah dari satu adalah ketersediaan sarana produksi tani dan industri, kualitas transportasi publik, dan ketersediaan internet. Hasil observasi, wawancara dan data sekunder menunjukkan untuk komponen sarana produksi tani dan industri, mayoritas masih berskala mikro di mana modal usaha dipenuhi secara individu. Subterminal agribisnis yang telah dibangun sejak tahun 2003 tidak digunakan untuk kegiatan pemasaran produk pertanian dan hanya difungsikan sebagai tempat penyimpanan beberapa jenis komoditas. Selain itu, untuk teknologi pertanian yang digunakan masih bersifat semi tradisional, proses usaha tani mulai dari pembibitan hingga panen dilakukan secara manual dengan sedikit bantuan traktor pada saat penyiapan lahan. Kemudian pada komponen kualitas transportasi publik (kenyamanan dan kelancaran), sarana yang tersedia adalah angkutan umum yang menghubungkan antara pusat Kota Bukittinggi dengan ibukota kecamatan di Nagari Baso. Angkutan tersebut melewati jalan kolektor primer, dan sering terjadi kemacetan pada saat-saat jam sibuk. Untuk komponen akses internet, hasil observasi menunjukkan bahwa wilayah yang jauh dari jalan raya (seperti Nagari Panampuang dan Lambah) mendapatkan koneksi internet yang sangat lemah dan hanya bisa mengakses telepon dan pesan teks.

**Aset Institusional Sosial**

Aset institusional sosial menggambarkan serangkaian modal yang dapat memberikan individu kesempatan yang lebih luas untuk meningkatkan kapabilitas maupun modal lain dalam kebermanfaatannya. Sumber daya ini dapat digunakan untuk memperluas jejaring guna

mendapatkan informasi serta peluang kerja sama dan berpartisipasi dalam mendapatkan manfaat.



Sumber: Analisis penulis (2021)

Gambar 6. Grafik pengukuran aset institusional sosial

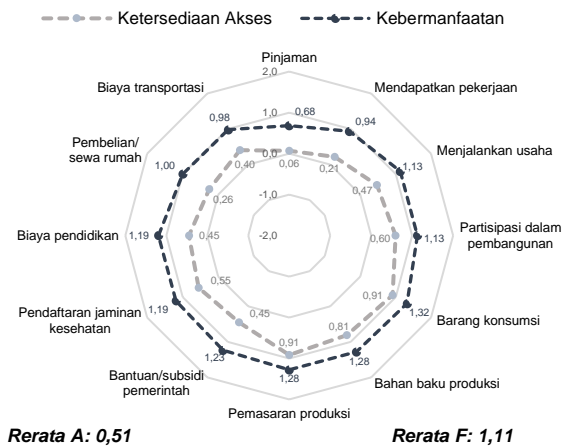
Aspek ketersediaan pada kelompok aspek ini menggambarkan tingkat intensitas keikutsertaan petani dalam masing-masing komponen aset. Berdasarkan hasil analisis pada Gambar 6, diketahui bahwa ketujuh komponen memiliki nilai mendekati satu atau dapat diartikan intensitas keikutsertaan antara cukup dan sering. Sebagian besar petani yang menjadi responden merupakan anggota kelompok tani yang menurut para penyuluh cukup responsif dalam mengikuti kegiatan. Adapun untuk kegiatan penyuluhan oleh Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Ampek dilakukan sebanyak satu hingga dua kali dalam sebulan. Intensitas keikutsertaan petani bersifat fluktuatif, di mana biasanya akan berkurang di saat awal dan akhir siklus usaha tani.

Dalam hal kebermanfaatannya, berdasarkan Gambar 6, kelompok aset ini mendapatkan angka yang cukup rata antara 1,40 hingga 1,55 yang merepresentasikan adanya manfaat yang diberikan aset pada tingkat cukup tinggi. Komponen yang mendapatkan nilai tertinggi adalah gotong royong dan kerja sama, yang biasanya tercermin utamanya dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan juga pada sebagian proses usaha tani. Dalam hal kegiatan sosial kemasyarakatan, gotong royong dapat dilihat pada acara-acara adat dan keagamaan di mana diselenggarakan dengan bantuan warga sekitar.

**Aset Institusional Ekonomi**

Aset institusional ekonomi menggambarkan serangkaian kesempatan/peluang yang dimiliki/disediakan, khususnya dalam hal kemudahan pemenuhan kebutuhan sehari-hari serta akses

untuk menunjang kebutuhan proses usaha produktif.



Sumber: Analisis penulis (2021)

Gambar 7. Grafik pengukuran aset institusional ekonomi

Berdasarkan Gambar 7, rerata aspek ketersediaan untuk kelompok aset ini adalah 0,51 atau diinterpretasikan antara cukup dan baik. Hal tersebut menandakan bahwa kondisi akses terhadap kemudahan petani dalam menjalankan usahanya, mulai dari mendapatkan *input* hingga pemasaran, serta dalam mendapatkan barang konsumsi masih belum mencapai keadaan yang baik atau mudah. Terdapat tiga komponen dengan nilai keterjangkauan mendekati nol, yaitu akses terhadap pinjaman/kredit, kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dan kemudahan dalam menyewa dan membeli rumah. Untuk komponen pinjaman, diketahui bahwa terdapat sembilan lembaga keuangan mikro agribisnis (LKM-A) yang tersebar di tujuh nagari di Kecamatan Ampek Angkek dan dapat diakses oleh petani anggota kelompok tani. Namun para petani cenderung untuk tidak menggunakannya jika tidak mendesak dikarenakan adanya kecenderungan untuk menghindari praktik kredit serta ketidakdamaian akan perasaan memiliki hutang. Kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan serta membeli/membayar sewa rumah juga mendapatkan nilai akses mendekati nol, karena hal ini berkaitan dengan masih banyaknya petani yang berstatus sebagai petani dengan lahan sewa atau buruh tani harian. Petani yang tidak memiliki lahan umumnya adalah penduduk pendatang yang belum memiliki hunian tetap. Terdapat keterbatasan jenis pekerjaan yang dapat diakses oleh para petani tersebut, mayoritasnya hanyalah pada bidang jasa sebagai pegawai toko ataupun sebagai buruh yang mengandalkan kekuatan fisik. Adapun komponen kesempatan untuk memulai/menjalankan usaha juga tidak berada dalam keadaan baik dengan rerata nilai akses 0,47. Dua komponen dengan

nilai akses mendekati satu adalah akses untuk kemudahan dalam mendapatkan barang konsumsi sehari-hari, bahan baku produksi, serta pemasaran hasil produksi. Kondisi ini didukung oleh lokasi Kecamatan Ampek Angkek yang sebagian wilayahnya adalah termasuk ke dalam kawasan perkotaan Bukittinggi.

Rerata untuk aspek kebermanfaatan pada kelompok aset ini mendapat nilai paling rendah di antara kelima jenis aset. Terdapat tiga komponen aset dengan kebermanfaatan di bawah satu, yaitu akses untuk mendapatkan pinjaman/kredit, kemudahan dalam mendapatkan pekerjaan, dan kemampuan pembayaran biaya transportasi. Untuk dua aset pertama yaitu pinjaman dan kemudahan mendapatkan pekerjaan, jangkauan akses yang dirasakan petani memang masih belum memadai sehingga tidak dirasakan manfaatnya secara langsung. Untuk komponen pembayaran biaya transportasi, rerata jangkauan kemampuan petani berada pada angka 0,40 atau masih dikategorikan cukup/biasa saja. Interpretasi kebermanfaatan yang hampir mendekati satu menunjukkan bahwa pada saat-saat tertentu, komponen biaya transportasi mungkin membebani petani utamanya dalam pengeluaran modal. Biaya transportasi biasanya dikeluarkan pada saat membeli kebutuhan modal penanaman seperti pupuk dan pestisida, serta pada saat panen untuk pengangkutan ke pedagang pengumpul. Kebutuhan volume yang diangkut dalam jumlah besar mungkin dirasakan bagi sebagian petani agak memberatkan dalam pengeluaran biaya transportasi.

### Aset yang Belum Memadai dan Implikasinya terhadap Perwujudan Kebermanfaatan Petani

Hasil analisis indeks kapabilitas petani di Kecamatan Ampek Angkek yang memiliki angka positif menunjukkan aset-aset yang ada telah mampu berkontribusi dalam menciptakan peluang bagi petani, namun nilai yang masih relatif rendah menunjukkan tingkat kesempatan yang dimiliki masih terbatas. Kesejahteraan petani dapat dikatakan masih belum optimal karena derajat kebebasan yang relatif rendah, sehingga berimplikasi kepada keterbatasan untuk meraih kehidupan yang berkualitas.

Hasil analisis tersebut juga dapat dikaitkan dengan gambaran umum ekonomi petani (sebagaimana terangkum pada Tabel 4), hampir 90% masih belum memiliki penghasilan yang cukup untuk mencapai taraf hidup layak sesuai dengan standar UMR. Kondisi pendapatan dalam beberapa tahun ke belakang juga tidak membaik, dan akan sangat menghambat petani untuk mewujudkan banyak kebermanfaatannya dalam

berusaha tani. Aset sebagai komponen utama yang dinilai pada penelitian ini, berkontribusi dalam perwujudan kebermanfaatan petani. Identifikasi lanjutan untuk mengetahui pada aset-aset mana saja yang masih belum optimal kemudian berguna untuk mengetahui kebermanfaatan apa saja yang terhambat dan berpengaruh terhadap kapabilitas petani, khususnya dalam proses berusaha tani. Penelusuran akan dikhususkan kepada aset-aset yang masih mendapatkan nilai kualitas ketersediaan (A) paling rendah (di bawah 0,5), dan memiliki kebermanfaatan (F) positif.

Hasil pengelompokan sebagaimana ditampilkan pada Tabel 5 menunjukkan terdapat empat belas komponen dari tiga kategori aset dengan nilai penguasaan di bawah 0,50, dengan perincian yaitu aset berwujud individu (4 dari 6 aset), aset institusional ekonomi (7 dari 12 aset) dan aset tanwujud individu (3 dari 11 aset).

Tabel 5. Komponen aset yang belum memadai

No.	Komponen Aset	A	F	Kategori
1.	Bahasa asing	-0,51	0,89	IIA
2.	Tabungan	-0,21	0,89	ITA
3.	Pinjaman	0,06	0,68	EIA
4.	Alat transportasi	0,21	1,11	ITA
5.	Mendapatkan pekerjaan	0,21	0,94	EIA
6.	Pembelian/ sewa rumah	0,26	1,00	EIA
7.	Tingkat pendapatan	0,34	1,23	ITA
8.	Biaya transportasi	0,40	0,98	EIA
9.	Alat akses informasi	0,43	1,28	ITA
10.	Kewirausahaan	0,45	1,30	IIA
11.	Bantuan/subsidi pemerintah	0,45	1,23	EIA
12.	Biaya pendidikan	0,45	1,19	EIA
13.	Interpretasi informasi untuk keahlian teknis	0,47	1,40	IIA
14.	Kemudahan memulai/ menjalankan usaha	0,47	1,13	EIA

Sumber: Analisis Penulis (2021)

Dari keempat belas komponen yang mendapatkan nilai belum memadai jika dikaitkan dengan sistem usaha tani, maka sebagian besarnya dapat dikelompokkan kepada aspek modal finansial (tabungan, akses terhadap pinjaman dan subsidi/ bantuan pemerintah, tingkat pendapatan dan kemampuan biaya transportasi) serta modal manusia (kemampuan bahasa asing, kewirausahaan dan interpretasi untuk keahlian teknis) (Barry dan Robison 2001; Huffman 2001).

Dalam hal permodalan finansial, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa modal pembiayaan berperan dalam peningkatan *input*

usaha tani untuk pengembangan skala usaha, hasil produksi dan keuntungan usaha tani (Barry dan Robison 2001; Desfiyani 2014; Aminda et al. 2018; Guswardi 2020). Pendapatan, tabungan serta akses terhadap pinjaman/ kredit merupakan sumber utama bagi petani untuk mendapatkan modal keuangan untuk membiayai berbagai *input* yang dibutuhkan. Pendapatan yang kurang stabil, preferensi yang kurang baik atas kredit, serta tidak terpenuhinya syarat-syarat pengajuan kredit menjadi penghambat bagi petani untuk memiliki modal finansial yang layak. Keterbatasan tersebut membuat petani cenderung untuk menghindari risiko untuk menambah modal finansial baik untuk peningkatan *input* ataupun sarana pendukung lain, sehingga akan sangat sulit pula untuk dapat meningkatkan profitabilitas usaha. Hal ini berdampak kepada performa usaha dari sisi pendapatan yang dimiliki petani yang sulit untuk meningkat.

Adapun aset tanwujud individu khususnya pada kelompok modal manusia intelektual, berperan dalam peningkatan produktivitas usaha pertanian serta daya saing melalui kemudahan adopsi teknologi, penciptaan inovasi, dan mengurangi beban pekerja (Huffman 2001). Hasil wawancara dengan penyuluh pertanian menyebutkan bahwa untuk kemampuan teknis budi daya, petani umumnya telah menguasai keahlian yang memadai. Namun dalam hal kemampuan untuk berinovasi dan mengembangkan usaha lanjutan lebih dari sekedar penjualan produk mentah, para petani belum memiliki kapasitas yang cukup pada bidang tersebut. Aset ini sangatlah krusial karena merupakan tenaga endogen utama yang mampu mengombinasikan dan mengembangkan sumber daya lain, dan memiliki keunikan dalam keberadaannya yang tidak akan habis (Zaika dan Gridin 2020). Keterbatasan tersebut menyebabkan petani akan sulit untuk menerapkan sistem perencanaan usaha, inovasi, hingga manajemen yang berguna dalam membangun rantai usaha yang lebih panjang dan dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Kondisi saat ini, petani hanya melakukan penjualan produk mentah berupa gabah ataupun produk hortikultura lain kepada pedagang perantara atau pengepul. Siklus usaha tersebut sulit untuk dikembangkan sehingga tidak memberikan nilai tambah yang besar bagi pendapatan petani.

Meskipun demikian, sumber daya lain berupa aset pada bidang infrastruktur, layanan publik dan lingkungan fisik, serta kompetensi modal manusia dasar mendapatkan kualitas ketersediaan yang baik dengan kebermanfaatan yang cukup tinggi. Sebagaimana tersaji pada Tabel 6, ketersediaan dan kebermanfaatan untuk komponen aset ini

mendapatkan nilai yang cukup baik dan menjadi potensi untuk diberdayakan guna menanggulangi keterbatasan kebermanfaatan tersebut pada tingkat tertentu.

Infrastruktur secara luas dapat memberikan kemudahan aksesibilitas, peningkatan produktivitas, hingga peningkatan pendapatan petani (Suwardi 2011; Llanto 2012; Subroto dan Sapha 2016). Identifikasi di Kecamatan Ampek Angkek menunjukkan kondisi infrastruktur dan lingkungan yang sangat mendukung bagi kegiatan pertanian, sehingga dapat dimanfaatkan secara lebih optimal. Ketersediaan jaringan jalan, fasilitas pasar, dan sarana transportasi umum merupakan aset publik yang tersedia dalam kualitas baik dan berperan dalam kemudahan aksesibilitas guna menekan biaya pada besaran tertentu. Kualitas lingkungan, produktivitas lahan dan ketersediaan air bersih juga dapat terjangkau dengan baik sebagai salah satu *input* dasar bagi usaha tani. Dari sisi modal manusia dasar, aset berupa pendidikan formal, kesehatan dan kekuatan, serta semangat dan daya juang petani merupakan potensi untuk dapat mengembangkan kapasitas SDM yang lebih maju.

Tabel 6. Komponen aset dengan nilai kualitas keterjangkauan dan kebermanfaatan baik

No.	Komponen aset	A	F	Kategori
1.	Pendidikan formal	1,00	1,36	IIA
2.	Daya juang untuk belajar dan maju	1,00	1,51	IIA
3.	Kesiapan penanggulangan bencana	1,00	1,38	PTA
4.	Jaringan jalan	1,02	1,45	PTA
5.	Fasilitas pasar	1,02	1,49	PTA
6.	Keamanan dari bencana	1,04	1,49	PTA
7.	Ketersediaan transportasi umum	1,04	1,53	PTA
8.	Kesehatan dan kekuatan	1,06	1,45	IIA
9.	Fasilitas kesehatan	1,11	1,43	PTA
10.	Produktivitas lahan	1,17	1,55	PTA
11.	Fasilitas pendidikan	1,17	1,49	PTA
12.	Air bersih	1,17	1,55	PTA
13.	Kualitas lingkungan	1,23	1,51	PTA

Sumber: Analisis penulis (2021)

Pengukuran CCI dalam mengidentifikasi kesejahteraan petani bertujuan untuk dapat menggambarkan aspek yang lebih idiosinkratik dan tidak menggeneralisasi terhadap konsep kesejahteraan terhadap satu aspek tertentu. Wawancara terhadap sejumlah petani menunjukkan bahwa hingga saat ini, mereka masih merasa puas dan bersyukur terhadap kehidupan sekarang. Bekerja sebagai petani berdasarkan pendapat mereka,

masih dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga, dan yang paling penting cukup untuk pendidikan tinggi bagi anak-anak mereka. Namun, mereka mengemukakan bahwa di masa depan, kondisi tersebut tidak dapat terjamin karena pekerjaan ini memiliki banyak risiko, dan diperparah dengan tuntutan pengeluaran yang semakin besar. Bekerja sebagai petani di masa depan dianggap tidak prospektif jika tanpa disertai dengan adanya pekerjaan sampingan, sehingga para petani sangat menginginkan agar kelak anak-anak mereka memiliki pekerjaan yang lebih stabil. Dengan masih adanya persepsi demikian, maka di masa depan akan sangat mungkin jika sektor ini akan terus menunjukkan performa yang stagnan atau malah menurun, sehingga diperlukan kebijakan yang struktural dan komprehensif untuk mencegahnya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Identifikasi kesejahteraan menggunakan pendekatan ukuran kapabilitas masyarakat bertujuan untuk dapat mengungkapkan kondisi realitas kehidupan petani secara lebih komprehensif. Indeks kapabilitas masyarakat petani di Kecamatan Ampek Angkek memiliki angka positif yang berarti tingkat kebebasan sudah berkembang dengan aset-aset yang tersedia mampu memberikan peluang bagi terciptanya kebermanfaatan petani. Namun derajat kebebasan yang masih tergolong rendah mengindikasikan masih terdapat keterbatasan petani untuk menjalani kehidupan yang lebih berkualitas. Modal finansial dan modal manusia intelektual memiliki tingkat penguasaan yang masih kurang sehingga berimplikasi kepada hambatan kebermanfaatan petani di Kecamatan Ampek Angkek untuk dapat mengembangkan dan meluaskan usahanya menjadi lebih produktif. Meskipun demikian, kelebihan pada aset berwujud publik dan modal manusia dasar merupakan salah satu potensi yang dapat dikembangkan secara lebih mendalam.

### Saran

Dalam rangka peningkatan kebermanfaatan petani, maka diperlukan usaha menyeluruh untuk meningkatkan akses dalam hal modal finansial serta kualitas modal manusia intelektual. Di tingkat Kecamatan Ampek Angkek, penyuluh pertanian terlebih dahulu perlu untuk menjaring aspirasi petani mengenai bantuan permodalan yang dibutuhkan, preferensi mekanisme, hingga kemungkinan risiko yang dapat terjadi. Kegiatan ini dapat juga dibarengi dengan masukan mengenai

jenis-jenis program pelatihan yang dibutuhkan untuk peningkatan modal manusia disertai dengan metode yang lebih sesuai dengan keadaan petani. Informasi tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan mekanisme kemudahan pinjaman, dan program pelatihan peningkatan kompetensi petani oleh Pemerintah Kabupaten Agam bekerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah, institusi penelitian dan pengembangan pertanian, serta lembaga pelatihan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian. Keterlibatan petani dalam pemberian masukan, rekomendasi dan saran perbaikan menjadi penting demi tercapainya peningkatan kapabilitas petani serta mencapai kehidupan yang lebih baik. Partisipasi tersebut juga dapat dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan pertanian khususnya di Kabupaten Agam, agar program dan kegiatan yang dikeluarkan dapat lebih menjawab isu-isu yang secara nyata dihadapi oleh petani.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih diucapkan kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang telah membiayai penelitian sekaligus beasiswa program pascasarjana kepada penulis. Apresiasi juga diberikan kepada 47 petani di Kecamatan Ampek Angkek yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini, dan juga kepada Bapak dan Ibu Penyuluh serta pejabat lain di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Ampek Angkek atas informasi dan data yang diberikan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alkire S. 2016. The capability approach and well-being measurement for public policy [Internet]. Adler MD, Fleurbaey M, editors. Oxford; [cited 2021 Apr 4]. Available from: <https://www.ophi.org.uk/wp-content/uploads/ophiwp094.pdf>. doi: 10.1093/oxfordhb/9780199325818.013.18.
- Sen A. 2001. Development as freedom. UK ed. edition (US): OUP Oxford
- Aminda FR, Sinaga BM, Fariyanti A. 2018. Dampak faktor eksternal terhadap kesejahteraan rumah tangga petani Tebu Keprasan di Jawa Tengah. *J Agro Ekon* [Internet]. [cited 2021 Aug 5]; 35(2):127-150. Available from: <http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/jae/article/view/7938>. doi: 10.21082/jae.v35n2.2017.127-150.
- Bappeda Sumbar. 2018. Kawasan agropolitan di Provinsi Sumatera Barat [Internet]. [cited 2021 Apr 6]. Available from: <https://bappeda.sumbarprov.go.id/home/news/4-kawasan-agropolitan-di-provinsi-sumatera-barat.html>
- Bappenas. 2004. Pelaksanaan REPELITA II: Lampiran pidato kenegaraan presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat tahun 1979. Jakarta (ID): Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Barry PJ, Robison LJ. 2001. Agricultural finance: credit, credit constraints, and consequences. In: Gardner BL, Rausser GC, editors. *Handbook of Agricultural Economics Volume 1A: Agricultural Production*. Amsterdam (NL): North Holland.
- Bhandari H, Yasunobu K. 2009. What is Social Capital? A Comprehensive Review of the Concept. *Asian J Soc Sci* [Internet]. [cited 2021 Jun 1]; 37(3):480-510. Available from: [https://brill.com/view/journals/ajss/37/3/article-p480\\_12.xml](https://brill.com/view/journals/ajss/37/3/article-p480_12.xml). doi: 10.1163/156853109x436847.
- Booth A. 2000. Poverty and inequality in The Soeharto Era: an assessment. *Bull Indones Econ Stud* [Internet]. [cited 2021 May 3]; 36(1):73-104. Available from: <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00074910012331337793>.
- BPP Kecamatan Ampek Angkek. 2019. Profil Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Ampek Angkek. Agam (ID): Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Ampek Angkek.
- BPS. 2018a. Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) 2018. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik.
- BPS. 2018b. Produk domestik regional bruto provinsi-provinsi di Indonesia menurut lapangan usaha 2014-2018. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik.
- Brown LD. 1985. People-centered development and participatory research. *Harvard Edu Rev* [Internet]. [cited 2021 May 6]; 55(1):69-76. Available from: <https://meridian.allenpress.com/her/article/55/1/69/31390/peoplecentered-development-and-participatory>. doi: 10.17763/haer.55.1.r07478n215287101.
- Cohen WM, Levinthal DA. 1989. Innovation and Learning: The Two Faces of R & D. *The Econ J* [Internet]. [cited 2021 Apr 7]; 99(397):569. Available from: <https://academic.oup.com/ej/article/99/397/569-596/5188256>. doi: 10.2307/2233763.
- Dakhli M, De Clercq D. 2004. Human capital, social capital, and innovation: a multi-country study. *Entrepreneurship & Regional Development* [Internet]. [cited 2021 Mar 4]; 16(2):107-128. Available from: <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08985620410001677835>. doi: 10.1080/08985620410001677835.
- Damayanthi R V. 2008. Proses Industrialisasi di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Politik. *J Indones Applied Econ* [Internet]. [cited 2021 May 15]; 2(1):1-2008. Available from: <http://jiae.ub.ac.id/index.php/jiae/article/view/149>. doi: 10.21776/ub.jiae.2008.002.01.3.
- Daryanto A. 2012. Memposisikan secara tepat pembangunan pertanian dalam perspektif pembangunan nasional. In: *Prosiding Seminar Nasional Petani dan Pembangunan Pertanian; 2011*

- October 12; Jakarta, Indonesia [Internet]. Bogor (ID): Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian; [cited 2021 May 4]; p. 26–46. Available from: [https://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdf/ind/pros\\_2012\\_02\\_mu\\_arief.pdf](https://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdf/ind/pros_2012_02_mu_arief.pdf)
- Depkimpraswil. 2003. Depkimpraswil bangun PSD [Internet]. [cited 2021 Aug 7]. Available from: <https://www.pu.go.id/berita/depkimpraswil-bangun-psd>
- Desfiyani S. 2014. Analisa pengaruh kredit lembaga keuangan mikro agribisnis terhadap usahatani mentimun (*Cucumis Sativa*) di Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh [Skripsi]. [Padang (ID)]: Universitas Andalas.
- Devkota PL. 1970. People-centered development in Nepal: An innovative approach. Occasional Papers in Sociology and Anthropology [Internet]. [cited 2021 May 7]; 6:26–40. Available from: <https://www.nepjol.info/index.php/opsa/article/view/1100>. doi: 10.3126/opsa.v6i0.1100.
- Disperta Agam. 2018. Rencana strategis Dinas Pertanian Kabupaten Agam 2016-2021. Lubuk Basung (ID): Dinas Pertanian Kabupaten Agam.
- Fallo FAI, Sinaga BM, Hartoyo S, Simatupang P. 2018. Dampak alokasi bantuan modal dan tenaga kerja keluarga terhadap kesejahteraan rumah tangga petani di Nusa Tenggara Timur. J Agro Ekon [Internet]. [cited 2021 May 16]; 36(2):113. Available from: <http://ejournal.litbang.pertanian.go.id/index.php/jae/article/view/9114>. doi: 10.21082/jae.v36n2.2018.113-134.
- Frediani AA, Julia H, editors. 2015. The capability approach in development planning and urban design. London (UK): Development Planning Unit, University College London.
- Gébert J, Bajmocy Z, Málovics G. 2017. How to evaluate local economic development projects from a people-centred perspective? An analytical framework based on the capability approach. DETUROPE [Internet]. [cited 2021 Apr 18]; 9:4–24. Available from: [http://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/2716/3/tézisfuzet\\_angol.pdf](http://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/2716/3/tézisfuzet_angol.pdf)
- Ghani E. 2013. How to Avoid Middle Income Traps? World Bank Blogs [Internet]. [cited 2021 May 29]. Available from: <https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/how-avoid-middle-income-traps>
- Guswardi Y. 2020. Pengaruh kredit terhadap usahatani padi anggota LKM-A Pincuran Bonjo di Kelurahan Padang Alai Bodi Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh [Skripsi]. [Padang (ID)]: Universitas Andalas.
- Huffman WE. 2001. Chapter 7 Human capital: education and agriculture. In: Handbook of Agricultural Economics Volume 1A: Agricultural Production [Internet]. Amsterdam; [cited 2021 May 18]; p. 333–381. Available from: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1574007201100101>
- Jamal E. 2009. Membangun momentum baru pembangunan pedesaan di Indonesia. J Penelit dan Pengembang Pertan [Internet]. [cited 2021 May 20]; 28(1):7–14. Available from: <http://ejournal.litbang.pertanian.go.id/index.php/jppp/article/view/7765>. doi: 10.21082/jp3.v28n1.2009.p7.
- Kasmadiharja H, Hadi S, Sjaf S. 2016. Arahan pengembangan kawasan agropolitan berbasis komoditas sayuran unggulan di Kabupaten Agam [Internet]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor; [cited 2021 May 20]. Available from: <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/81209>
- Korten DC. 1984. Strategic organization for people-centered development. Public Administration Review [Internet]. [cited 2021 May 8]; 44(4):341. Available from: <https://www.jstor.org/stable/976080?origin=crossref>. doi: 10.2307/976080.
- Li Y, Westlund H, Liu Y. 2019. Why some rural areas decline while some others not: An overview of rural evolution in the world. J Rural Stud [Internet]. [cited 2021 May 10]; 68:135–143. Available from: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S04301671830929x>. doi: 10.1016/j.jrurstud.2019.03.003.
- Llanto GM. 2012. The impact of infrastructure on agricultural productivity [Internet]. Makati City: Philippine Institute for Development Studies (PIDS); [cited 2021 May 11]. Available from: <http://hdl.handle.net/10419/126883>
- Martina M, Praza R. 2018. Analisis Tingkat Kesejahteraan Petani Padi Sawah Di Kabupaten Aceh Utara. Agrifo: J Agribis Universitas Malikussaleh [Internet]. [cited 2021 Nov 29]; 3(2):27. Available from: <http://ojs.unimal.ac.id/index.php/agrifo/article/view/1109>. doi: 10.29103/ag.v3i2.1109.
- Migheli M. 2011. Capabilities and Functionings: The Role of Social Capital for Accessing New Capabilities. Rev Politic Econ [Internet]. [cited 2021 May 7]; 23(1):133–142. Available from: <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09538259.2011.526297>.
- Mustika L. 2019. Identifikasi karakteristik sosial ekonomi dan tingkat kehidupan petani padi sawah di Desa Rantau Kecamatan Lintang, Kanan Kabupaten Empat Lawang [Skripsi]. [Palembang (ID)]: Universitas Sriwijaya.
- Pramono R, Nurfaejrina IA, Nariswari N. 2019. Aspek-aspek pembentuk kualitas tempat berdasarkan survei kapabilitas: Determinan bagi kebahagiaan masyarakat. TATALOKA [Internet]. [cited 2021 Mar 15]; 21(1):153. Available from: <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/tataloka/article/view/2770>. doi: 10.14710/tataloka.21.1.153-169.
- Pramono RWD. 2016. Capability Approach for well-being Evaluation in Regional Development Planning: Case Study in Magelang Regency, Central Java, Indonesia. Yogyakarta.
- Pramono RWD. 2020. Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Wilayah dengan Pendekatan Kapabilitas. Sleman (ID): Deepublish.

- Putterman L. 2013. Institutions, social capability, and economic growth. *Econ Systems* [Internet]. [cited 2021 May 13] 37(3):345–353. Available from: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0939362513000344>. doi: 10.1016/j.ecosys.2012.12.002.
- Rachmat M. 2013. Nilai tukar petani: konsep, pengukuran dan relevansinya sebagai indikator kesejahteraan petani. *Forum penelit Agro Ekon* [Internet]. [cited 2021 Sep 30] 31(2):111. Available from: <http://ejournal.litbang.pertanian.go.id/index.php/fae/article/view/3833>. doi: 10.21082/fae.v31n2.2013.111-122.
- Rahayu DT, Tou HJ, Wahyudi WW. 2021. Identifikasi tingkat kesejahteraan keluarga petani padi di Desa Sungai Tutung Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci [Tugas Akhir]. [Padang (ID)]: Universitas Bung Hatta.
- Robeyns I. 2017. *Wellbeing, freedom and social justice: The capability approach re-examined*. 1st editio. Cambridge (UK): Open Book Publisher. doi: 10.11647/obp.0130. doi: 10.11647/obp.0130.
- Robeyns I, Byskov MF. 2021. The capability approach [Internet]. Zalta EN, editor. [place unknown]: Metaphysics Research Lab, Stanford University; [cited 2021 Nov 28]. Available from: <https://plato.stanford.edu/archives/fall2021/entries/capability-approach/>
- Sen A. 2000. *Development as Freedom*. New York (US): Anchor Books.
- Sinuraya JF, Sinaga BM, Oktaviani R, Hutabarat B. 2018. Dampak kebijakan pajak ekspor dan tarif impor terhadap kesejahteraan produsen dan konsumen kakao di Indonesia. *Jurnal Agro Ekonomi* [Internet]. [cited 2021 May 1] 35(1):11. Available from: <http://ejournal.litbang.pertanian.go.id/index.php/jae/article/view/8532>. doi: 10.21082/jae.v35n1.2017.11-31.
- Subroto ZW, Sapha D. 2016. Pengaruh infrastruktur terhadap sektor pertanian di Pulau Sumatera. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekon Pembangun* [Internet]. [cited 2021 Nov 28] 1(2):598–610. Available from: <http://www.jim.unsyiah.ac.id/ekp/article/view/5854>
- Suradisastra K. 2017. Revitalisasi kelembagaan untuk percepatan pembangunan sektor pertanian dalam otonomi daerah. *Anal Kebijak Pertan* [Internet]. [cited 2021 Nov 28] 4(4):281–315. Available from: <http://ejournal.litbang.pertanian.go.id/index.php/akp/article/view/5370>. doi: <http://dx.doi.org/10.21082/akp.v4n4.2006.281-315>.
- Suwardi A. 2011. Pengeluaran pemerintah daerah, produktivitas pertanian, dan kemiskinan di Indonesia. *J Ekon Pembangun Indones* [Internet]. [cited 2021 May 15] 12(1):39–55. Available from: <https://jepi.fe.ui.ac.id/index.php/jepi/article/view/287>.
- Swastika DKS. 2014. Reformasi paradigma urbanisasi: strategi percepatan pengentasan kemiskinan di pedesaan. In: Haryono, Pasandaran E, Rachmat M, Mardianto S, Sumedi, Salim HP, Heriadi A, editors. *Reformasi Kebijakan Menuju Transformasi Pembangunan Pertanian*. Jakarta (ID): IAARD Press, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian; p. 357–383.
- Tan E. 2014. Human Capital Theory. Review of Educational Research [Internet]. [cited 2021 May 8] 84(3):411–445. Available from: <http://journals.sagepub.com/doi/10.3102/0034654314532696>.
- Yunelimeta. 2008. *Pembangunan pedesaan dalam konteks agropolitan, desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, studi kasus Daerah Minangkabau-Sumatera Barat* [Tesis]. [Semarang (ID)]: Universitas Diponegoro.
- Zaika S, Gridin O. 2020. Human capital development in the agricultural economy sector. Technology audit and production reserves [Internet]. [cited 2021 Nov 20] 1(4(51)):30–36. Available from: <http://journals.uran.ua/tarp/article/view/194444>. doi: 10.15587/2312-8372.2020.194444.